

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Deskripsi Latar Belakang Objek Penelitian

a. Profil BPKAD Kabupaten Blitar

Mengingat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar merupakan SKPD baru di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar maka kinerja pelayanan yang telah diberikan sampai tahun 2013 adalah bahwa pengelolaan keuangan dan aset daerah telah dilakukan dengan bekerjasama dengan SKPD lain.

Dengan adanya beberapa perubahan kondisi masyarakat dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Blitar, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar harus menyesuaikan visinya untuk tahun 2014-2016 yang lebih menantang, berorientasi pada kepentingan masyarakat, bersifat jangka panjang, memberikan kekuatan dan mengilhami, berorientasi pada perubahan-perubahan dan masa depan yang diharapkan, maka RENSTRA BPKAD harus :

- 1) mencerminkan apa yang ingin dicapai.
- 2) memberikan arah dan fokus strategi yang jelas.
- 3) menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan stratejik.
- 4) memiliki orientasi terhadap masa depan.

Sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar

mempunyai perbedaan dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya dalam rekening belanja tidak langsung yang dikelolanya. Selain Belanja Pegawai sebagaimana Organisasi Perangkat Daerah lainnya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar juga mengelola rekening-rekening belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, rekening belanja tidak terduga yang menyebabkan besarnya belanja tidak langsung pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar.

2. Lokasi Instansi

Nama Instansi : Badan Penegelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Sudanco Supriyadi No. 17 Kota Blitar

3. Visi dan Misi

a. Visi :

1) Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing

Lebih Sejahtera, berarti meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin. Secara lahir adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara baik, pengurangan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Peningkatan kesejahteraan secara batin diwujudkan dalam penciptaan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif, serta adanya kebebasan dan kemudahan

masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Maju, dimaknai dengan adanya perkembangan positif dalam setiap aspek kehidupan masyarakat terutama terkait dengan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM), tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik .

Berdaya Saing, yaitu terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Blitar untuk memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki sehingga mampu bersaing secara regional, nasional bahkan internasional.

b. Misi :

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Blitar tersebut maka Misi Pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui akselerasi program pengentasan kemiskinan, optimalisasi dan pengembangan program pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat sasaran.
- 2) Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan (religius), kearifan lokal dan hukum melalui optimalisasi kehidupan beragama dan kehidupan sosial, serta penerapan peraturan perundang-undangan.
- 3) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat melalui peningkatan mutu bidang pendidikan (termasuk di dalamnya

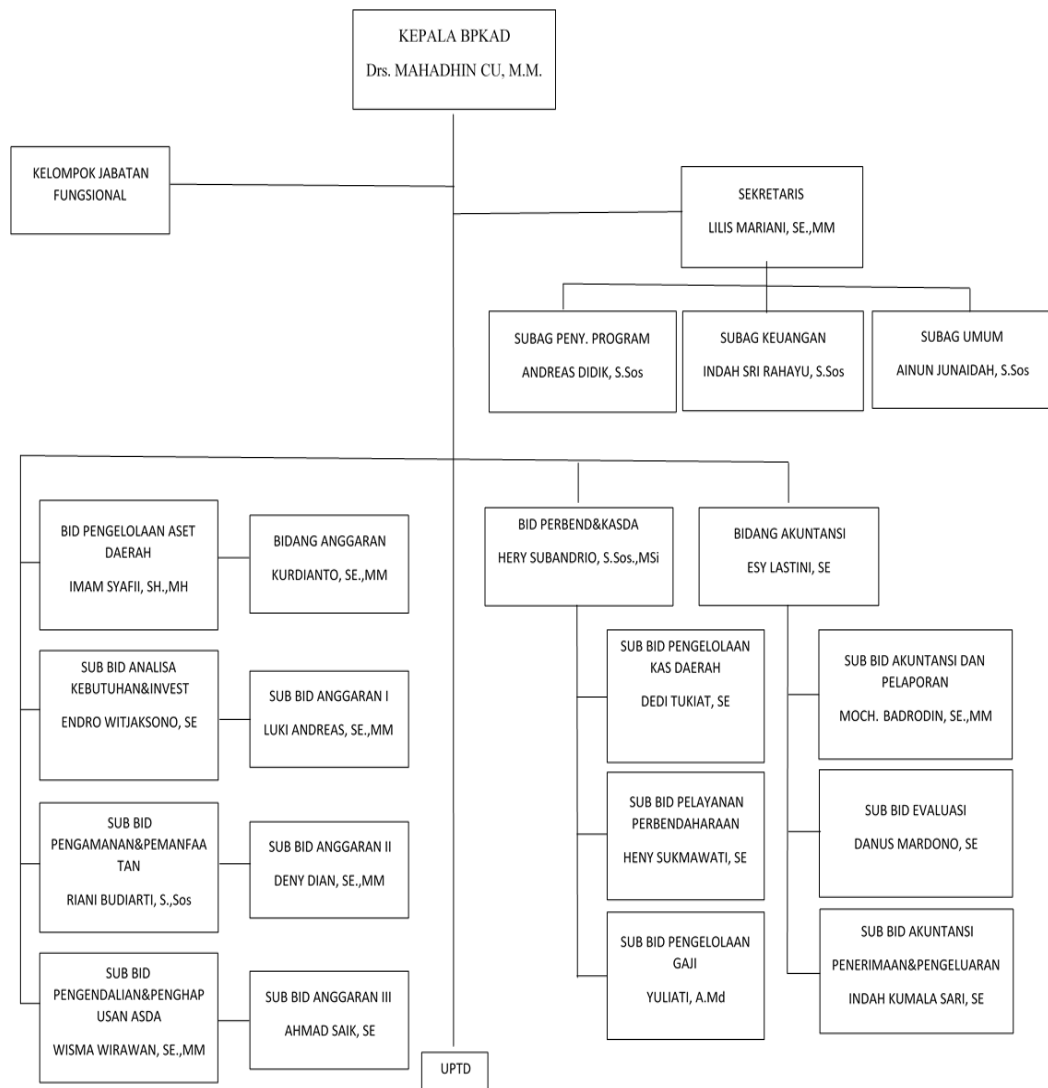
- adalah wawasan kebangsaan, budi pekerti, praktek keagamaan) dan kesehatan serta kemudahan akses memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memadai.
- 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
 - 5) Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing melalui peningkatan ketrampilan dan keahlian, pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis Koperasi dan UMKM, ekonomi kreatif, jiwa kewirausahaan, potensi lokal daerah dan penguatan sektor pariwisata serta pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
 - 6) Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pemba'ngunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.¹

¹ <http://bpkad.blitarkab.go.id/> Diakses pada tanggal 26 April 2019

4. Struktur Organisasi

Gambar 4.1

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BLITAR



B. Temuan Penelitian

Dalam penelitian ini kedudukan informan sangat penting karena sebagai sumber data yang utama dan akurat. Selain itu dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah Pegawai Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Blitar. Untuk lebih jelasnya disini peneliti akan mengupas satu persatu, profil informan yang akan peneliti teliti.

Tabel 1.1
Profil Informan di BPKAD Kabupaten Blitar

No	Nama	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1	Dedy Tukiyat, S.E.	Laki-laki	Kasubbid Penerimaan & Pengeluaran
2	Sugging Khoirum Anwar, S.E.	Laki-Laki	Kasubbid Evaluasi
3	Ari Budi Astuti, S.E.	Perempuan	Staff Bidang Akuntansi
4	Niken Mardiana, A.md.	Perempuan	Staff Bidang Akuntansi

Sumber : Diolah Peneliti

Temuan penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam menjelaskan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini peneliti memaparkan suatu temuan yang hanya berkaitan dengan fokus penelitian agar tidak melebar ke fokus pembahasan yang lain. Fokus penelitian yang ada di penelitian skripsi ini hanya membahas :

1. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah terhadap kualitas laporan keuangan

Kualitas laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten dikatakan baik jika memiliki kriteria seperti kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian intern. Kualitas laporan keuangan berpengaruh pada akuntabilitas, dengan kualitas laporan keuangan yang baik akan memberikan pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang dibuat, hal tersebut akan berpengaruh terhadap pemberian opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan.

Peneliti mencari data terkait dengan penerapan Sistem manajemen daerah di BPKAD Kabupaten Blitar. Yang pertama peneliti lakukan adalah dengan mewawancarai Pegawai/Staff dari BPKAD Kabupaten Blitar yang dianggap memahami dan menguasai tentang Sistem informasi manajemen daerah.

Di BPKAD Kabupaten Blitar penerapan Sistem informasi manajemen daerah sangat baik dan bertahap mengalami perubahan untuk mengikuti perkembangan sebagai mana wawancara yang dilakukan penulis dengan Dedy Tukiyat, S.E. selaku Kasubbid penerimaan dan Pengeluaran di BPKAD Kabupaten Blitar mengenai penerapan sistem informasi manajemen daerah, beliau mengatakan:

“Penerapan SIMDA di Kabupaten Blitar ini dimulai pada tahun 2009 dari situ berkembang terus menerus melalui perubahan versi untuk mengikuti perkembangan, penerapan SIMDA ini sangat diperlukan

karena kuantitas transaksi keuangan di Pemerintah Kabupaten Blitar terus menerus meningkat”²

Pernyataan dari Bapak Dedy Tukiyat, S.E. tersebut juga didukung dengan informasi yang disampaikan oleh Ibu Niken Mardani, A.md. selaku bagian Staf di Bidang Akuntansi dengan pertanyaan yang sama.

Beliau mengatakan:

“Aplikasi SIMDA di Kabupaten Blitar itu sangat membantu untuk proses pelaporan dan penganggaran karena menyediakan database mengenai aspek keuangan, asset daerah, kepegawaian atau aparatur Daerah maupun pelayanan Publik yang dapat digunakan untuk penilaian Instansi Pemerintah Daerah”³

Dari data diatas dapat diketahui bahwa penerapan sistem informasi manajemen daerah pada BPKAD Kabupaten Blitar sejak 2009 sampai 2019 ini sangat membantu untuk proses pelaporan dan penganggaran.

Gambar Aplikasi Sistem informasi manajemen daerah pada BPKAD KabupatenBlitar.⁴



Gambar 4.1 Aplikasi SIMDA

² Wawancara dengan Bapak Dedy Tukiyat, S.E. selaku Kasubbid Penerimaan & Pengeluaran di BPKAD Kabupaten Blitar Senin 29 April 2019.

³ Wawancara dengan Ibu Niken Mardiana, A.md. selaku Staff Bidang Akuntansi di BPKAD di BPKAD Kabupaten Blitar Senin 29 April 2019.

⁴ Dokumentasi pada tanggal 15 juli 2018

Peneliti kemudian menanyakan tentang mengapa BPKAD Kabupaten Blitar menggunakan SIMDA dalam proses anggaran dan pelaporan, Bapak Sugging Khoirum Anwar, S.E. selaku Kasubbid Evaluasi. Beliau mengatakan:

“Ini sebenarnya dalam rangka proses efektivitas dan efisiensi sehingga nantinya mulai dari proses penganggaran, proses pelaksanaan, sampai proses pelaporan nanti diharapkan pelaporannya bisa sinkronisasi dengan menggunakan Aplikasi SIMDA ini”⁵

Aplikasi ini awalnya yang menawarkan BPKP seperti yang disampaikan oleh Bapak Dedy Tukiyat, S.E. selaku Kasubbid penerimaan dan Pengeluaran di BPKAD Kabupaten Blitar Beliau mengatakan :

“Awalnya SIMDA ini yang menawarkan BPKP karena BPKP bersedia untuk mendampingi penerapan SIMDA ini. Jadi dengan adanya pendampingan dari BPKP dimana aplikasinya juga dari BPKP maka diharapkan dari Pemerintah Kabupaten Blitar dapat menggunakan aplikasi dengan sebaik-baiknya”⁶

Dedy Tukiyat, S.E. selaku Kasubbid penerimaan dan Pengeluaran di BPKAD Kabupaten Blitar menerangkan mengenai standart akuntansi yang digunakan pada aplikasi SIMDA. Beliau mengatakan :

“Dari awalnya aplikasi SIMDA ini berbasis cash basis dan sekarang sudah akrual basis sehingga dasar dalam Basis akrual ini dapat memeberikan gambaran yang lebih baik mengenai kinerja di BPKAD, sehingga di BPKAD dapat membuat kebijakan yang lebih relavan untuk kedepannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa aplikasi SIMDA pada BPKAD Kabupaten Blitar ini sudah sesuai dengan standart akuntansi ”⁷

⁵ Wawancara dengan Bapak Sugging Khoirum Anwar, S.E. selaku Kasubbid Evaluasi di BPKAD Kabupaten Blitar Senin 29 April 2019.

⁶ Wawancara dengan Bapak Dedy Tukiyat, S.E. selaku Kasubbid Penerimaan & Pengeluaran di BPKAD Kabupaten Blitar Senin 29 April 2019.

⁷ Wawancara dengan Bapak Dedy Tukiyat, S.E. selaku Kasubbid Penerimaan & Pengeluaran di BPKAD Kabupaten Blitar Senin 29 April 2019.

Lalu peneliti menanyakan tentang jenis implementasi SIMDA yang ada di BPKAD, Bapak Sugging Khoirum Anwar, S.E. selaku Kasubbid Evaluasi. Beliau mengatakan :

“Di BPKAD aplikasi SIMDA ini terbagi menjadi beberapa jenis implementasi yaitu SIMDA Keuangan, SIMDA Barang Milik Daerah (BMD), SIMDA Gaji, SIMDA Pendapatan, Aplikasi gabungan Provinsi, Aplikasi rekonsiliasi Bank, dan SPP S.D SP2D”⁸

Setelah itu dengan pertanyaan yang sama terkait penerapan Sistem informasi manajemen daerah terhadap kualitas laporan keuangan, Ibu Ari Budi Astuti, S.E. selaku Staff di Bidang Akuntansi Beliau menjelaskan mengenai kegunaan SIMDA , beliau mengatakan :

“Digunakan mulai proses anggaran, penata usahaan,sampai dengan pelaporan. Jadi nanti untuk anggaran output nya adalah RKA, DPA, terus di penata usahaan ada SP2D dan SPM, dari sisi pendapatan menghasilkan STS dan disitu fiktornya sudah banyak, dan dalam pelaporan menghasilkan LPSAL, LPE, LRA, LO, Neraca, Jurnal”⁹

2. Penerapan Sistem informasi manajemen daerah terhadap kualitas laporan keuangan dalam pandangan Islam.

Setelah mengetahui penerapan sistem irformasi manajemen daerah, peneliti melanjutkan wawancara lagi untuk mengentahui Penerapan Sistem informasi manajemen daerah terhadap kualitas laporan keuangan dalam pandangan Islam. Ibu Niken Mardiana, A.md. selaku Staff di Bidang Akuntansi. Beliau memaparkan :

⁸ Wawancara dengan Bapak Sugging Khoirum Anwar, S.E. selaku Kasubbid Evaluasi di BPKAD Kabupaten Blitar Senin 29 April 2019.

⁹ Wawancara dengan Ibu Ari Budi Astuti, S.E. selaku Staf di Bidang Akuntansi di BPKAD Kabupaten Blitar Senin 29 April 2019.

“Dalam SIMDA menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat, dan akurat sehingga data nya dapat dipercaya dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan”¹⁰

Setelah itu Ibu Niken Mardiana, A.md. selaku Staf di Bidang Akuntansi. Beliau memaparkan :

“Aplikasi SIMDA ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta Aplikasi SIMDA dapat di implementasikan untuk mengelola keuangan daerah secara terintegrasi dari penyusunan anggaran, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban keuangan”¹¹

Pernyataan dari Ibu Niken Mardani, A.md. tersebut juga didukung dengan informasi yang disampaikan oleh Ibu Ari Budi Astuti, S.E. selaku Staff di Bidang Akuntansi. Beliau mengatakan :

“Data yang dientry di SIMDA sudah valid,kalaupun ada kesalahan misalnya kelebihan belanja dan itu sudah menjadi sp2d nanti di bidang akuntansi bisa dilakukan jurnal koreksi misalnya seperti itu dan data yang salah dibenarkan”¹²

Dari penjelasan dari pihak BPKAD Kabupaten Blitar di atas yang dipaparkan oleh Ibu Niken mardiana, A.md. dan Ibu Ari Budi Astuti, S.E. selaku Staff di Bidang Akuntansi dapat dikatakan bahwa dalam menginput data mengunakan simda sudah valid dan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Aplikasi SIMDA Keuangan di disain berdasarkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti :

b. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Niken Mardiana, A.md. selaku Staf di Bidang Akuntansi di BPKAD Kabupaten Blitar Senin 29 April 2019.

¹¹ Wawancara dengan Ibu Niken Mardiana, A.md. selaku Staf di Bidang Akuntansi di BPKAD Kabupaten Blitar Senin 29 April 2019.

¹² Wawancara dengan Ibu Ari Budi Astuti, S.E. selaku Staf di Bidang Akuntansi di BPKAD Kabupaten Blitar Senin 29 April 2019.

- c. Undang undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara
- d. UU No. 25 tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- e. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- f. UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- g. Peraturan Pemerintah RI nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
- h. PP No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- i. PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- j. PP No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- k. PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
- l. PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- m. Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pengelolaan barang Milik Daerah
- n. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006
- o. Permendagri 20 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus
- p. Permendagri 21 Tahun 2011

q. Permendagri 32 Tahun 2011¹³

Secara spesifik, al Qur'an menggambarkan bahwa peranan informasi yang hak atau benar, memiliki karakteristik sebagai berikut :

a. Informasi dapat menyenangkan hati penerima informasi. Sesuai dengan Q.S. Hud Ayat 120. Allah Taala berfirman :

وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ۗ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ
وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

Artinya : *Dan semua kisah dari Rasul-rasul Kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya Kami teguhkan hatimu dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman.*¹⁴

b. Informasi yang benar dan perlu diketahui oleh orang lain dan tidak mencampur adukkan berita yang benar dengan berita yang salah/batil Q.S Al-Baqoroh Ayat 42 :

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.*¹⁵

c. Informasi yang adil dengan tidak memihak salah satu pihak. Allah Taala berfirman dalam Q.S. Al-Hujarat Ayat 9 :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا
الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya : *Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang*

¹³ <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/333/versi-2.1.bpkp> diakses pada tanggal 30 April 2019 jam 19:56 WIB.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm.235.

¹⁵ *Ibid.*, hlm.7.

*satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.*¹⁶

- d. Informasi yang dapat menyelesaikan perbedaan/pertentangan diantara penerima dan dapat mendamaikan dari perselisihan mereka Q.S Al-Baqarah Ayat 213 :

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَعِيًّا بَيْنَهُمْ ۖ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Artinya : *manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), Maka Allah mengutus Para Nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, Yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.*¹⁷

- e. Informasi yang tidak hanya mengikuti kepuasan subjektif. Penyampaian informasi yang cenderung tidak sesuai dengan kebenaran, tetapi informasi yang mendorong munculnya semangat berkompetisi dalam berbuat kebaikan (*sabiqun bil al kahiraat*) serat dapat menyentuh rasa penerima informasi, sehingga mereka memiliki ketetapan hati tentang kebenaran yang diterimanya. Q.S. Al-Maidah Ayat 48 dan 83 :

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm.616.

¹⁷ *Ibid.*, hlm.33.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۗ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya : Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain it, Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya,lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.¹⁸

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ۖ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ

Artinya : Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul (Muhammad), kamu Lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran (Al Quran) yang telah mereka ketahui (dari Kitab-Kitab mereka sendiri); seraya berkata: "Ya Tuhan Kami, Kami telah beriman, Maka catatlah Kami bersama orang-orang yang menjadi saksi (atas kebenaran Al Quran dan kenabian Muhammad s.a.w.).¹⁹

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm.116.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 122

3. Kendala yang dihadapi saat menerapkan Sistem informasi manajemen daerah pada BPKAD Kabupaten Blitar

Setiap sistem pasti memiliki kelebihan dan tentunya juga memiliki kekurangan pada setiap implementasinya, dalam aplikasi SIMDA yang digunakan dalam penganggaran dan pelaporan pun tidak jauh dari kata sempurna pasti ada kesalahan atau kekurangan dalam aplikasi ini.

Lalu peneliti menanyakan kendala yang dihadapi saat menerapkan Sistem Informasi Manajemen daerah pada BPKAD Kabupaten Blitar. Ibu Ari Budi Astuti, S.E. selaku staf di Bidang Akuntansi. Beliau mengatakan :

“Setiap aplikasi itu pasti ada kelebihan dan kekurangan, kekurangannya seperti data yang sudah di entri mengalami kesalahan misalnya saat menginput data pajak karena adanya kesalahan aplikasi ini membolehkan mengentri data yang benar melalui proses penataan usaha itu kemudian dilihat dari laporannya buku pajaknya sudah benar, dilaporan SPJ fungsionalnya juga sudah benar, tetapi dilaporan fungsionalnya itu masih salah”²⁰

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Sugging Khoirum Anwar, S.E. selaku Kasubbid Evaluasi terkait kekurangan yang dihadapi saat menerapkan aplikasi SIMDA. Beliau mengatakan :

“Dalam mengimplementasikan SIMDA pada BPKAD Kabupaten Blitar itu sebenarnya kurang pelatihan sehingga dalam menggunakan aplikasi tersebut sebagian pegawai atau staf yang ada di BPKAD Kabupaten Blitar masih mengalami kebingungan dalam menggunakan aplikasi ini”²¹

Kendala dari Ibu Niken Mardiana, Amd, beliau memamparkan sebagai berikut:

²⁰ Wawancara dengan Ibu Ari Budi Astuti, S.E. selaku Staf di Bidang Akuntansi di BPKAD Kabupaten Blitar Senin 29 April 2019.

²¹ Wawancara dengan Bapak Sugging Khoirum Anwar, S.E. selaku Kasubbid Evaluasi di BPKAD Kabupaten Blitar Senin 29 April 2019.

“Terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti kuantitas dan kualitas SDM yang masih kurang dalam pengelolaan SIMDA, dengan kenaikan aset dan kewajiban ekuitas yang terjadi di Kabupaten Blitar, maka semakin kompleks pula masalah dalam proses pengelolaan keuangannya, penerapan SIMDA keuangan yang dilakukan diharapkan mampu mempermudah pelaksanaan dalam proses laporan keuangan”²²

Kendala dari Bapak Dedy Tukiyat, S.E. memamparkan sebagai berikut:

“Permasalahan yang dihadapi yaitu saat proses entry data, apabila sejak awal pengisian data tidak lancar dan tidak akurat, maka pekerjaan untuk mengoreksi data akan bertambah panjang, dan pelaporan yang tepat pada waktunya tidak akan tercapai”²³

Kemudian beliau melanjutkan penjelasannya:

“Kurang nya Pengertian dan kesadaran dari SDM sebagai pengisi data. Banyak pengisi data yang tidak sadar bahwa data yang akan dimasukkan ke dalam computer harus memiliki format dan prosedur yang pasti untuk menghindari kesalahan pengisian data”

Kemudian beliau melanjutkan penjelasannya mengenai kendala menggunakan akrual basis :

“yang pertama yaitu masalah perbandingan yang lama menggunakan kas basis terus akrual basis, yang lama itu kan laporan keuangan dibandingkan kan tidak bisa karena basisnya beda brarti kita harus menyamakan yang lama menjadi akrual sehingga bisa dibandingkan dan masalah lainnya yaitu tambahan rekeningnya”

4. Solusi untuk masalah yang dihadapi saat menerapkan Sistem informasi manajemen daerah pada BPKAD Kabupaten Blitar

Adapun solusi dalam mengatasi kendala dalam penerapan Sistem informasi manajemen daerah pada BPKAD Kabupaten Blitar. Seseorang harus bisa mencari solusi yang tepat dalam mengatasinya.

Pernyataan dari Bapak Dedy Tukiyat, S.E. beliau mengatakan :

²² Wawancara dengan Ibu Niken Mardiana, A.md. selaku Staf di Bidang Akuntansi di BPKAD Kabupaten Blitar Senin 29 April 2019

²³ Wawancara dengan Bapak Dedy Tukiyat, S.E. selaku Kasubbid Penerimaan & Pengeluaran di BPKAD Kabupaten Blitar Senin 29 April 2019

“Jadi yang menerapkan aplikasi SIMDA ini bukan hanya Pemerintah Kabupaten Blitar saja ,ada beberapa daerah yang menggunakan aplikasi ini dan kebanyakan seluruh wilayah yang ada di Indonesia menggunakan aplikasi SIMDA dari BPKP. Dari beberapa wilayah tersebut dibentuk seperti Group pada *WhatsApp* masenger kusus untuk SIMDA dimana jika ada kesulitan dalam menggunakan aplikasi SIMDA dapat ditanyakan melalui group whasap diharapkan Daerah yang mempunyai kesulitan yang sama dan sudah menemukan solusinya mungkin dapat di informasikan untuk mengatasi kesulitan di Daerah lain dan selain itu juga BPKP sendiri kita masih bisa melakukan konsultasi dan kordinasi kesana”²⁴

Adapun pernyataan dari Ibu Niken Mardiana, A.md. selaku Staf Bidang Akuntansi di BPKAD Kabupaten Blitar, beliau memamparkan :

“Untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik tidak hanya perlu aplikasi SIMDA saja namun juga perlu SDM yang baik pula untuk mengoprasikan aplikasi SIMDA itu sendiri, sehingga saran saya seharusnya perlu diadakanya 1 sampai 4 kali pelatihan/diklat agar SDM yang menjalankan aplikasi ini lebih berkualitas sehingga menghasilkan laporan yang baik pula”²⁵

Pernyataan dari Ibu Ari Budi Astuti, S.E. selaku Staf di Bidang Akuntansi di BPKAD Kabupaten Blitar, Beliau memaparkan :

“Dilakukan koordinasi dengan BPKP atas kendala yang dihadapi agar dapat mengoptimalisasi aplikasi SIMDA sesuai dengan yang di harapkan. Sehingga jalinan kerja sama ini memiliki tujuan yang sama yakni meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja negara/pemda yang menghasilkan laporan kerja dan kinerja yang efektif”²⁶

Pernyataan dari Bapak Sugging Khoirum Anwar, S.E. selaku Kasubbid Evaluasi di BPKAD Kabupaten Blitar, Beliau memaparkan :

“Solusi untuk kendala yang dihadapi BPKAD Kabupaten Blitar mengenai aplikasi SIMDA yakni seharusnya dilakukan pembenahan

²⁴ Wawancara dengan Bapak Dedy Tukiyat, S.E. selaku Kasubbid Penerimaan & Pengeluaran di BPKAD Kabupaten Blitar Senin 29 April 2019.

²⁵ Wawancara dengan Ibu Niken Mardiana, A.md. selaku Staf di Bidang Akuntansi di BPKAD Kabupaten Blitar Senin 29 April 2019.

²⁶ Wawancara dengan Ibu Ari Budi Astuti, S.E. selaku Staf di Bidang Akuntansi di BPKAD Kabupaten Blitar Senin 29 April 2019.

regulasi, dilakukan peningkatan kemampuan dan wawasan tiap personil dalam BPKAD Kabupaten Blitar tentang teknologi dan sistem informasi serta meningkatkan performansi sistem aplikasi pada BPKAD Kabupaten Blitar agar sesuai dengan harapan yang diinginkan”²⁷

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pegawai dan staf pada BPKAD Kabupaten Blitar, maka peneliti selanjutnya melakukan analisis data di lapangan berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem informasi manajemen daerah terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan paparan data diatas dijelaskan beberapa temuan penelitian di BPKAD Kabupaten Blitar tentang penerapan sistem informasi manajemen daerah terhadap kualitas laporan keuangan sebagai berikut:

- a. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem informasi manajemen Daerah pada Kabupaten Blitar pada tahun 2009 sampai tahun 2019 selalu mengalami perubahan versi untuk mengikuti perkembangan teknologi, supaya bisa mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi manajemen daerah pada PBKAD Kabupaten Blitar.
- b. Dalam penerapan aplikasi Sistem informasi manajemen daerah pada BPKAD Kabupaten Blitar, aplikasi ini sangat membantu pegawai dan staf yang ada di BPKAD Kabupaten Blitar, karena didalam aplikasi SIMDA ini menyediakan database mengenai aspek keuangan, Asset

²⁷ Wawancara dengan Bapak Sugging Khoirum Anwar,SE selaku Kasubbid Evaluasi di BPKAD Kabupaten Blitar Senin 29 April 2019.

keuangan daerah, Kepegawaian atau Aparatur Daerah maupun pelayanan Publik yang dapat digunakan untuk penilaian instansi Pemerintah. Sehingga membantu penganggaran dan pelaporan keuangan daerah lebih efektif dan efisien.

- c. Pernerapan SIMDA pada BPKAD Kabupaten Blitar pada awalnya yang menawarkan adalah BPKP, setelah itu dari pihak BPKP mendampingi dalam proses penerapan aplikasi pada BPKAD Kabupaten Blitar pada tahun 2009, sejak aplikasi ini digunakan menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat melaksanakan pengelolaan keuangan secara terintegrasi, dimulai dari penganggaran, penatausahaan, hingga dalam bidang akuntansi dan pelaporannya.
- d. Aplikasi Sistem informasi manajemen daerah pada PBKAD Kabupaten Blitar pada awalnya berbasis cash basis yaitu pendapatan diakui pada saat kas benar-benar diterima atau adanya penerimaan uang dan biaya diakui pada saat kas benar-benar dikeluarkan dan sekarang berubah menjadi akrual basis yaitu pendapatan dan biaya diakui pada saat terjadinya transaksi tanpa memperhatikan apakah terjadi penerimaan atau pengeluaran kas. Sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat atas kondisi keuangan organisasi daripada akuntansi berbasis kas.
- e. Aplikasi Sistem informasi manajemen daerah yang dikelola oleh BPKP ini sudah sesuai dengan undang-undang tentang Standart

Akuntansi Pemerintah (SAP). Dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah yang sesuai standart Akuntansi Pemerintah diharapkan dalam tahapan perencanaan, penganggaran, peneatausahaan, serta Akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah pada BPAKD Kabupaten Blitar menjadi lebih baik dan berkualitas

Jadi dapat disimpulkan dari data diatas bahwa aplikasi Sistem informasi manajemen daerah pada BPKAD Kabupaten Blitar yang dibimbing BPKP dalam proses implementasinya pada tahun 2009 sampai 2019 sangat membantu dalam proses anggaran dan pelaporan, sehingga lebih efektif dan efisien dalam pengoptimalan kualitas laporan keuangan.

2. Penerapan Sistem informasi manajemen daerah terhadap kualitas laporan keuangan dalam pandangan Islam

Bedasarkan paparan data yang diperoleh dapat diketahui bahwa dalam penerapan aplikasi Sistem informasi manajemen daerah pada BPKAD Kabupaten Blitar ini sudah menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat, jujur dan akurat sehingga data nya dapat dipercaya dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan.

Dalam aplikasi Sistem informasi manajemen daerah di BPKAD Kabupaten Blitar sudah sesuai dengan Standart Akuntansi Pemerintah serta sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, sehingga terbebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang bersifat material. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam aplikasi Sistem

informasi manajemen daerah pada BPKAD Kabupaten Blitar ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

3. Kendala yang dihadapi saat penerapan Sistem informasi manajemen daerah pada BPKAD Kabupaten Blitar

Bedasarkan paparan data yang ditemui dilapangan, yang menjadi kendala saat penerapan Sisten informasi manajemen daerah pada BPKAD Kabupaten Blitar ini adalah adanya dua faktor, yaitu faktor Internal dan faktor Eksternal sebagai berikut:

a. Internal

- 1) Data yang sudah di enrtly terkadang mengalami masalah.

b. Eksternal

- 1) Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang masih kurang sehingga beberapa Pegawai atau Staf yang ada di BPKAD Kabupaten Blitar masih mengalami kebingungan dalam mengoprasikan aplikasi SIMDA ini.

Jadi, dapat disimpulkan kendala yang sering terjadi saat penerapan Sistem informasi manajemen daerah di BPKAD Kabupaten Blitar ini yakni dalam mengiput data masih ada kesalahan dan Sumber daya manusia yang kurang berkualitas, akan mempengaruhi hasil kinerja aplikasi itu sendiri. Sehingga akan menjadi kendala, pekerjaan mengoreksi data akan bertambah lebih panjang dan pelaporan yang tepat pada waktunya tidak akan tercapai.

4. Solusi untuk masalah yang dihadapi saat menerapkan Sistem informasi manajemen daerah pada BPKAD Kabupaten Blitar

Untuk mencari solusi untuk mengatasi kendala yang ada di BPKAD Kabupaten Blitar seperti kesalahan data input yang sudah di entry dan Sumber daya manusia yang kurang paham akan aplikasi SIMDA yang diterapkan di BPKAD Kabupaten Blitar. Dari kendala tersebut secara keseluruhan telah terjadi kesalahan dalam entry data sehingga terjadi kesalahan dalam proses anggaran dan pelaporan Dan SDM yang kurang paham akan aplikasi , sebagai solusi untuk mengatasinya pihak BPKAD Kabupaten Blitar mempunyai solusi sebagai berikut :

- a. Membuat Group *WhatsApp* khusus untuk mendiskusikan aplikasi SIMDA, dimana jika ada kesulitan dalam menggunakan aplikasi SIMDA dapat ditanyakan melalui group *whasap* diharapkan Daerah yang mempunyai kesulitan yang sama dan sudah menemukan solusinya mungkin dapat di informasikan untuk mengatasi kesulitan di Daerah lain.
- b. Dilakukan koordinasi dengan BPKP atas kendala yang dihadapi agar dapat mengoptimalisasi aplikasi SIMDA sesuai dengan yang di harapkan.
- c. Diadakanya 1 sampai 4 kali pelatihan/diklat agar SDM yang menjalankan aplikasi ini lebih berkualitas sehingga menghasilkan laporan yang baik.

- d. Dilakukan pembenahan regulasi, dilakukan peningkatan kemampuan dan wawasan tiap personil dalam BPKAD Kabupaten Blitar tentang teknologi dan sistem informasi serta meningkatkan performansi sistem aplikasi di BPKAD Kabupaten Blitar

Secara singkat solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala penerapan Sistem informasi manajemen daerah di BPKAD Kabupaten Blitar dapat dituliskan sebagai berikut:

- a. Membuat Komunitas komunikasi dalam aplikasi whasap
- b. Dilakukan koordinasi dengan BPKP
- c. Diadakanya 1 sampai 4 kali pelatihan/diklat
- d. Dilakukan pembenahan regulasi
- e. Meningkatkan performansi sistem aplikasi